

Menyelamatkan Kehidupan, Melindungi Masyarakat, Memulihkan Lebih Baik

Newsletter

Edisi ke-14

Tokoh Agama Perempuan
Sebagai Pembela
Kesehatan Seksual dan
Reproduksi di Indonesia

Memulihkan Lahan
Gambut Indonesia,
Melindungi Planet Kita

Meningkatkan Akses
terhadap Air Minum yang
Aman di Indonesia

Vaksinasi Pengungsi
di Indonesia, Demi
Kepentingan Semua

Pengusaha Budaya
Perempuan Membawa Warna
pada Warisan Indonesia

© KEMITRAAN/Marselino Djeer

PESAN DARI KEPALA PERWAKILAN PBB DI INDONESIA

Dalam apa yang akan menjadi buletin terakhir di tahun 2021, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua, dari lubuk hati saya yang terdalam, atas ketekunan dan semangat gigih Anda selama setahun yang telah menguji kita tidak seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Ketabahan dan fleksibilitas Anda telah menjadi bagian integral dari banyak keberhasilan kita semua tahun ini. Dan saat kita menutup bab ini pada tahun 2021, saya yakin Anda akan setuju bahwa melihat tanda-tanda harapan di cakrawala sangat menggembirakan, dalam bentuk komitmen baru menuju pemulihan yang lebih baik dan lebih hijau dari COVID-19.

Memang, pada akhir COP26 pada bulan November, negara-negara anggota akhirnya mencapai kesepakatan yang, meskipun jauh dari sempurna, menjaga kemungkinan tetap hidup dengan membatasi pemanasan global hingga kenaikan 1,5 derajat celsius di atas tingkat pra-industri. Jangan salah—ini adalah jalur kehidupan bagi planet kita.

Dalam pidato di COP26, Presiden Jokowi menegaskan kembali tekad Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim. Indonesia termasuk di antara lebih dari 40 negara yang menandatangani komitmen untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi. Memang, pekerjaan telah dimulai pada rencana untuk merehabilitasi hutan bakau seluas 600.000 hektar pada tahun 2024—rehabilitasi bakau terbesar di dunia. Indonesia juga bergabung dengan komitmen untuk menghapus batubara secara bertahap. Namun dengan sederet pembangkit listrik tenaga batu bara baru yang sedang dalam proses, resolusi ini memerlukan pengawasan dan tepuk tangan kami.

Tim PBB telah bergabung dengan pemerintah Indonesia dalam berbagai inisiatif yang dirancang untuk menyembuhkan planet kita. Kami mendukung pemerintah untuk mencapai targetnya memulihkan 2,6 juta hektar lahan gambut terdegradasi di negara ini, dan kami membantu pengembangan alat untuk memungkinkan menandai anggaran untuk Perubahan Iklim dan Gender dalam sistem pembiayaan iklim nasional—bagian dari inisiatif untuk mendorong upaya pendanaan iklim yang peka gender.

Rekan-rekan, tingkat penyebaran COVID-19 telah menurun sejak musim panas ini, tetapi kita belum keluar dari masalah. Selama musim liburan dan tahun baru, saya menghimbau Anda semua untuk tetap waspada, dan terus mengikuti protokol kesehatan masyarakat untuk meminimalkan risiko bagi diri sendiri dan orang yang Anda cintai.

Kemunculan Omicron baru-baru ini—varian baru yang menjadi perhatian—adalah pengingat lain akan pentingnya kesetaraan vaksin. Itu adalah sesuatu yang terus dikerjakan oleh tim PBB kami, melalui mekanisme COVAX, dan melalui upayanya untuk membawa vaksin kepada para pengungsi. Dalam buletin bulan ini, Anda dapat membaca tentang cara-cara lain yang kami upayakan untuk mengatasi ketidaksetaraan: dari meningkatkan akses ke air minum yang aman, hingga bermitra dengan pemuka agama perempuan untuk kesehatan seksual dan reproduksi yang lebih baik, hingga mendukung produsen batik di daerah pedesaan.

Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk bekerja bersama Anda sepanjang tahun ini, saat kami di PBB menjunjung tinggi kewajiban kami terhadap kemanusiaan dan komitmen kami untuk tidak meninggalkan siapa pun. Saya berharap Anda dan semua keluarga Anda mendapatkan musim liburan yang aman dan bahagia, dan saya berharap dapat melihat apa yang dapat kita capai bersama di tahun 2022.

Valerie Julliard

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia



Perusahaan-perusahaan Berjanji untuk Memajukan Kesetaraan Gender Melalui Praktik Bisnis yang Responsif Terhadap Gender di Indonesia

© UN Women/Putra Djohan



© Women's Empowerment Principles

Mengatasi ketidaksetaraan gender adalah urusan semua orang. Sebagai masalah sosial dan ekonomi yang kritis, usaha bisnis memiliki peran mendasar dalam mempromosikan kepemimpinan dan kewirausahaan perempuan. Sebagai pengakuan atas kontribusi perusahaan terhadap kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, enam perusahaan menerima Penghargaan Women's Empowerment Principles (WEPs) pada akhir Oktober 2021.

Penghargaan WEP diselenggarakan oleh program perempuan PBB WeEmpower Asia dengan dukungan dari Uni Eropa.

Penghargaan tahun ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pengajuan aplikasi, hingga empat kali lebih tinggi dari aplikasi tahun lalu termasuk perusahaan milik negara dan usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai sektor. Inisiatif ini menjadi momentum untuk merayakan para pemimpin bisnis dan perusahaan yang mempromosikan praktik bisnis yang responsif terhadap gender dalam upaya mereka untuk memberdayakan perempuan dengan memenuhi potensi mereka. [Cari tahu lebih lanjut tentang Penghargaan WEP dan pemenang nasional di sini.](#)

Memulihkan Lahan Gambut Indonesia, Melindungi Planet Kita

Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 24 juta hektar lahan gambut – membentuk sekitar 36 persen dari total lahan gambut tropis dunia. Dalam keadaan alaminya, gambut tropis terdapat di rawa-rawa yang tergenang air dan merupakan salah satu upaya alam yang paling efektif untuk menghilangkan karbon dari atmosfer, dengan membantu mengurangi pemanasan global.

Menyadari pentingnya peran lahan gambut dalam menyimpan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya air dan mata pencaharian, pemerintah Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS) mengelola program dan mendukung BRG dalam pengembangan model restorasi lahan gambut yang efisien dan terintegrasi yang berfokus pada restorasi lahan gambut yang efektif di tujuh provinsi prioritas – Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Papua.

Program ini bekerja untuk memulihkan lahan gambut sekaligus meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesadaran, memperkuat kapasitas kelembagaan dan lokal serta mendukung pilihan mata pencaharian yang

berkelanjutan secara lingkungan yang memanfaatkan komoditas asli lahan gambut. Contohnya, memberikan bantuan kepada perangkat desa untuk mengembangkan rencana dan anggaran pembangunan desa jangka menengah yang mengintegrasikan kegiatan restorasi gambut, mempromosikan kerjasama untuk bertukar pengetahuan, dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi kebakaran gambut. [Untuk informasi lebih lanjut tentang kemitraan ini, klik di sini.](#)



© KEMITRAAN/Marselino Djeer

Mempromosikan Penganggaran yang Sensitif Terhadap Gender untuk Mengatasi Perubahan Iklim



Dampak buruk perubahan iklim telah mengganggu mata pencaharian petani di seluruh Indonesia, karena mereka tidak dapat lagi memperkirakan cuaca dan hasil panen akibat perubahan pola iklim. Petani lokal perlu melakukan diversifikasi tanaman mereka untuk menyesuaikan dengan perubahan iklim, begitu pula perempuan dalam menghadapi beban ganda untuk menangani tugas domestik mereka dan sebagai petani. Dengan demikian, penganggaran yang peka terhadap gender semakin penting bagi pemerintah untuk merespons krisis iklim.

Sebagai bagian dari kontribusi Indonesia pada [Perjanjian Paris](#) – pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara nasional dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, UNDP bersama UNEP pada Aksi Kemiskinan-Lingkungan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meluncurkan *Climate Budget Tagging* (CBT) untuk mendukung Kementerian Keuangan dalam meningkatkan transparansi pendanaan iklim publik. Akibat kurangnya pengetahuan pada dampak perubahan iklim terhadap perempuan, diperlukan lebih banyak program yang menggabungkan gender dan perubahan iklim serta pengarusutamaan gender dalam penganggaran negara. Untuk memulainya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah bekerja untuk mengembangkan Petunjuk Teknis Penandaan Anggaran Iklim yang Responsif Gender, yang akan membantu kementerian teknis dalam menerapkan penandaan ganda (gender dan perubahan iklim). [Klik disini untuk informasi lebih lanjut.](#)

Tokoh Agama Perempuan Sebagai Pembela Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Indonesia

Dai'ya, julukan tokoh perempuan agama Muslim, merupakan tokoh penting dalam pendidikan agama di masyarakat di Indonesia. Namun, ruang lingkup peran dan dampak pekerjaan mereka meluas melampaui ajaran agama. Nia Qolbunia, seorang dai'ya berusia 45 tahun yang juga seorang guru di sebuah SMP Islam, aktif memperjuangkan kesehatan seksual dan reproduksi dan keluarga berencana. "Saya ingin memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, khususnya kesehatan reproduksi dan pendidikan bagi perempuan, untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat," kata Nia.

Dai'ya adalah salah satu mitra penting UNFPA Indonesia dalam mencapai [Tiga Nol](#) (Tiga Hasil Transformatif), sebuah kesepakatan yang berupaya untuk mengakhiri kematian ibu yang dapat dicegah, kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk keluarga berencana, dan kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan. Mewujudkan Tiga Nol juga akan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030, memastikan tidak ada yang tertinggal.

UNFPA Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi Nia, Fatayat NU, sebagai salah satu mitra pelaksana proyek "[Leaving No One Behind \(LNOB\)](#)" UNFPA yang didukung oleh Pemerintah Jepang. Kemitraan ini berfokus pada peningkatan kapasitas dai'ya untuk mempromosikan kesehatan seksual dan reproduksi serta kesejahteraan perempuan dan anak perempuan selama pandemi. [Pelajari lebih lanjut di sini.](#)



© Fatayat NU



Vaksinasi Pengungsi di Indonesia, Demi Kepentingan Semua



© UNHCR Indonesia

Kebanyakan dari pengungsi di Indonesia yang melarikan diri dari krisis Afghanistan yang meningkat, tertinggal jauh dibelakang populasi lainnya dalam hal vaksinasi COVID-19. Namun, pada akhir September 2021, sebuah keputusan baru dari Kementerian Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses ke vaksinasi untuk 13.273 pengungsi di Indonesia, yang mencerminkan langkah-langkah yang lebih luas menuju inklusi yang lebih besar untuk salah satu kelompok paling rentan di negara ini. Menanggapi hal tersebut, UNHCR, IOM, UNICEF dan Kantor Kepala Perwakilan PBB bersama-sama mengadakan program vaksinasi bagi pengungsi di Jakarta melalui skema swasta pada awal Oktober 2021.

Keputusan tersebut memungkinkan pengungsi dengan dokumen identitas yang dikeluarkan UNHCR untuk mengakses skema vaksinasi sektor swasta dan skema vaksinasi COVID-19 nasional di daerah di mana setidaknya 70% populasi telah menerima dosis vaksin pertama. Itu berarti pengungsi di enam dari 34 provinsi di Indonesia sekarang memenuhi syarat untuk mendapatkan suntikan

COVID-19. Hingga saat ini, UNHCR menghitung bahwa lebih dari 4.800 penduduk Indonesia dari 13.273 pengungsi, atau sekitar 36%, telah menerima setidaknya satu dosis vaksinasi COVID-19.

Meskipun COVID-19 telah menghancurkan ekonomi maju dan negara berkembang, pengungsi termasuk di antara mereka yang paling terpuak. Akses yang adil dan lebih baik terhadap vaksin COVID-19, pendidikan, dan lapangan kerja yang menguntungkan para pengungsi serta komunitas yang menampungnya, dan langkah penting menuju inklusivitas yang luas dan kehidupan yang layak untuk para pengungsi. UNHCR terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan para pengungsi dapat hidup bermartabat sambil mereka menunggu solusi yang lebih permanen, mulai dari advokasi anak-anak pengungsi untuk mendaftar di sekolah nasional, memberikan pelatihan kewirausahaan digital, dan advokasi untuk akses ke pelayanan kesehatan dan vaksin COVID-19. [Cari tahu lebih lanjut di sini.](#)

Meningkatkan Akses terhadap Air Minum yang Aman di Indonesia

Di Indonesia, akses air layak merupakan masalah utama kesehatan masyarakat; tujuh dari sepuluh rumah tangga Indonesia mengkonsumsi air minum yang terkontaminasi E.coli. Oleh karena itu, peningkatan kualitas air minum memerlukan pelaksanaan rencana keamanan air atau *water safety plans* (WSP) dan penguatan kapasitas untuk pengawasan kualitas air.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengambil bagian dalam mengaudit pelaksanaan WSP di dua penyedia air minum pada tahun 2017 dan sejak itu mengadvokasi pendekatan yang difokuskan kembali pada keamanan dan kualitas air daripada kuantitas, keterjangkauan, dan kelanjutan. Tahun ini, upaya tersebut telah mencapai tonggak baru: peta jalan nasional WSP 2021-2025 yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Bappenas yang mencakup panduan implementasi di 190 kabupaten dan kota pada tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan WSP membutuhkan tenaga penyedia air yang terlatih dan terampil. Pada bulan Oktober 2021, WHO memberikan bantuan teknis untuk sesi pelatihan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian



© Indah Deviyanti/WHO Indonesia

Kesehatan, Bappenas dan Program USAID, Perairan Kota di Indonesia pada sanitasi dan kebersihan, dan Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH Plus). Pada pelatihan tersebut, WHO menekankan bahwa komitmen yang kuat dan kepemimpinan tingkat tinggi yang aktif sangat penting untuk pelaksanaan WSP yang berkelanjutan. Staf dan pemangku kepentingan perlu secara aktif mengembangkan rencana untuk memastikan keberhasilan dalam meningkatkan akses ke air minum yang aman di seluruh Indonesia. [Pelajari tentang panduan dan pokok pelatihan di sini.](#)

Pengusaha Budaya Perempuan Membawa Warna pada Warisan Indonesia



© Dok: Citi Foundation

Apa kesamaan dari pemandu wisata, ahli gastronomi junior, dan pemilik bisnis menjahit? Selain mewakili keragaman Indonesia yang kaya ini, baik dalam ekspresi budaya atau profesional seni, mereka semua adalah penerima manfaat dari kebijakan dan program UNESCO yang dihasilkan dari tiga konvensi budaya utama UNESCO, yaitu [Konvensi untuk Perlindungan dan Dukungan pada Keanekaragaman Ekspresi Budaya di tahun 2005](#), [Konvensi tahun 2003 untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda](#) dan [Konvensi tahun 1972 untuk Warisan Dunia](#).

Ekspresi budaya Indonesia dicirikan oleh warna dan rasa, dan tidak ada kesaksian yang lebih baik untuk keragaman yang sensitif ini selain sulaman batik yang dibuat oleh para perajin Indonesia. Untuk meningkatkan kewirausahaan pemuda dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal di sekitar situs warisan Indonesia, UNESCO telah

bermitra dengan Citi Foundation dan Pemerintah Jepang untuk mendirikan [Kita Muda Kreatif](#).

Sejak didirikan pada tahun 2017, Kita Muda Kreatif telah mengubah kehidupan manusia di seluruh kepulauan Indonesia, dari Bali dan Lombok hingga Candi Prambanan di Jawa dan Danau Toba di Sumatera. Ceplon, Anastasya, dan Repa adalah tiga peserta Kita Muda Kreatif dan dapat melihat bahwa program ini memberikan mereka keterampilan yang sangat berharga untuk mengembangkan bisnis mereka, melestarikan warisan takbenda, dan mengembangkan komunitas lokal mereka. [Klik di sini untuk membaca lebih lanjut tentang perjalanan pengusaha budaya perempuan yang kian populer](#) dan komitmen mereka untuk mempertahankan warisan tak ternilai Indonesia selama bertahun-tahun yang akan datang.

Keterlibatan Media untuk Meningkatkan Pelaporan Migrasi Tenaga Kerja yang Sensitif Gender



Media berperan penting dalam membentuk persepsi publik tentang migrasi tenaga kerja, yang dapat memengaruhi kebijakan dan praktik. Cakupan migrasi tenaga kerja cenderung berfokus pada kasus-kasus terhadap migran dan seringkali tanpa disadari dapat memperkuat stereotip negatif tentang pekerja migran, terutama perempuan, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap diskriminasi dan pelecehan.

Pada Oktober 2021, Program ILO-UN Women Safe and Fair dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta mengumpulkan

25 jurnalis dari media nasional dan regional untuk berpartisipasi dalam program pelatihan jurnalis selama tiga hari. Pelatihan ini dilakukan untuk mempromosikan pelaporan etis tentang migrasi tenaga kerja, melindungi dan memberdayakan perempuan pekerja migran dengan lebih baik, dan mengurangi persepsi negatif publik terhadap pekerja migran perempuan.

Para jurnalis yang berpartisipasi mempelajari bahasa dan pencerminan yang sensitif terhadap gender dan jurnalisisme etis untuk memberikan penggambaran gender yang adil. Selain itu, kunjungan ke salah satu Pusat Sumber Daya Pekerja Migran Responsif Gender (MRC) terpadu dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Cirebon, Jawa Barat, memungkinkan para wartawan untuk melihat jenis dukungan yang diberikan kepada pekerja migran, seperti layanan konseling psiko-sosial, bantuan hukum, dan lain-lain. Pelatihan ini juga memperkenalkan [kamus istilah yang ramah-media tentang migrasi versi Indonesia \(edisi Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan\)](#), yang berfungsi sebagai panduan bagi para profesional media ketika menulis atau melaporkan tentang migrasi tenaga kerja perempuan atau kekerasan terhadap perempuan dalam konteks migrasi. [Klik di sini untuk membaca artikel selengkapnya.](#)

© Antara/Wahyu Putra A.

PBB di Indonesia Telah Mengumumkan Pemenang Kompetisi Koreografi Tari Bahasa Isyarat Pertama

© UN in Indonesia



Gangguan pendengaran adalah gangguan yang paling umum di antara penyandang disabilitas berat di Indonesia, mendorong PBB di Indonesia untuk fokus mempopulerkan bahasa isyarat di antara inisiatif lain di sekitar Hari Penyandang Disabilitas Internasional tahun ini.

Dibuka pada awal November, kontes *Show Your Sign* meminta pengguna media sosial Indonesia untuk membuat koreografi orisinal untuk satu dari sepuluh lagu yang dipilih sebelumnya menggunakan bahasa isyarat. Hal ini disusun bersama oleh PBB di Indonesia dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dalam kemitraan dengan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatun), dan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo).

Dalam wawancara dengan Kepala Pusbisindo Laura Lesmana Wijaya, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliard menjelaskan bahwa pengalaman terputus dari jaringan normal selama pandemi mendorong PBB untuk fokus pada orang-orang dengan gangguan pendengaran untuk kampanye tahun ini. "Kami tidak dapat melihat orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang bekerja dengan kami. Satu-satunya hal yang kami miliki adalah layar untuk berkomunikasi," kata Julliard dalam wawancara, "kami perlu memastikan semua orang, apa pun kemampuan atau kecacatan mereka, dapat berkomunikasi.

Show Your Sign adalah bagian dari serangkaian kampanye terpadu PBB di Indonesia yang diselenggarakan sekitar 16 Hari Aktivisme Anti Kekerasan Berbasis Gender, yang berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember. Selain mempromosikan penggunaan bahasa isyarat, kampanye ini menjadi wadah bagi anggota komunitas tuli Indonesia untuk menunjukkan solidaritas dengan para penyandang kekerasan berbasis gender. [Baca lebih lanjut tentang kampanye Show Your Sign di sini.](#)

PBB di Indonesia dalam Acara 'Comedy for Equality' Mendorong Kreativitas dan Humor untuk Melawan Narasi yang Mendiskriminasi Perempuan

Seperti di banyak negara lainnya, Indonesia telah menyaksikan peningkatan tragis dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan selama pandemi COVID-19, akibat pembatasan pergerakan yang diberlakukan secara nasional. Penelitian yang dilakukan oleh UN Women menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak berdampak sama terhadap perempuan dan laki-laki di Indonesia. Dengan kerentanan yang sudah tinggi bahkan sebelum pandemi, perempuan kini semakin berisiko mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

Pada 11 Desember 2021, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia menggelar pertunjukan stand-up comedy "*Comedy for Equality*" yang menampilkan 10 komedian Indonesia yang dibimbing oleh komika Indonesia yang sudah meraih banyak penghargaan, Sakdiyah Ma'ruf.

Setiap penampil menulis naskah komedi mereka sendiri, yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP). Pertunjukan dimulai pada pukul 19:00 WIB pada 11 Desember 2021 secara virtual lewat Zoom dan n live streaming di Youtube Kumparan. "Kekerasan berbasis gender bisa menjadi topik yang tidak nyaman dan menyakitkan untuk didiskusikan. Tetapi untuk mengatasinya dengan efektif kita harus bisa membicarakannya dengan jujur," kata Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia Valerie Julliard. "Proyek "*Comedy for Equality*" kami menantang tabu dan membuat percakapan tentang subjek yang serius ini tidak terlalu menakutkan."

UN Women and UNFPA Indonesia membuka pendaftaran bagi publik untuk mengikuti lokakarya "*Comedy for Equality*" pada 30 Oktober 2021. Pendaftar yang tertarik dengan kesetaraan gender diminta untuk mengirimkan video pendek atau naskah komedi yang mereka tulis sendiri. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Ma'ruf dan juga menampilkan pembicara tamu, yaitu Devi Asmarani, Co-Founder dan Editor-in-Chief Magdalene.co, dan Inaya Wahid, seorang aktivis sosial dan budaya.

Sakdiyah Ma'ruf mengatakan bahwa selain mengubah narasi yang mendiskriminasi perempuan, inisiatif *Comedy for Equality* membantu "perempuan dan laki-laki untuk merefleksikan cerita mereka dalam menghadapi diskriminasi dan marginalisasi, dan menyediakan ruang yang aman bagi perempuan dan laki-laki untuk mengekspresikan diri mereka."

[Kunjungi kanal YouTube Kumparan untuk menonton acara *Comedy for Equality*.](#)

Apa Kabar Vaksinasi COVID-19 bagi Pengungsi & Migran di Indonesia?



VAKSINASI BAGI MIGRAN & PENGUNGI



Vaksinasi COVID-19 saat ini sudah diperuntukkan untuk semua golongan.

Namun, sayangnya migran dan pengungsi masih terkendala untuk mengakses vaksin COVID-19.

Padahal migran dan pengungsi lebih mungkin merasakan dampak yang lebih berat dari COVID-19.



Sumber: artikel tirto.id "Apa Kabar Vaksinasi COVID-19 Bagi Pengungsi dan Migran di Indonesia?" | Kerja sama dengan PBB & Verified

Vaksinasi COVID-19 saat ini sudah diperuntukkan untuk semua golongan, tak hanya lansia atau tenaga kesehatan, tetapi juga untuk kalangan umum usia produktif bahkan anak-anak dengan usia minimal 12 tahun. Namun demikian, berdasarkan tinjauan Organisasi Kesehatan Dunia ([WHO](#)), migran dan pengungsi masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses vaksin COVID-19. WHO menemukan bahwa migran dan pengungsi lebih mungkin untuk merasakan dampak yang lebih berat dari COVID-19. Selain itu, kondisi hidup kelompok ini membuat mereka lebih rentan terinfeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

Di [Indonesia](#), menurut data UNHCR per Oktober 2021, sejumlah 13.188 pengungsi dan juga pencari suaka terdaftar di kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), termasuk di dalamnya 71 persen orang dewasa dan 29 persen anak-anak. Namun, migran dan pengungsi masih mengalami berbagai kesulitan di Indonesia. Beberapa laporan Tirto menunjukkan [nasib](#) para pengungsi yang menunggu solusi jangka panjang, tidak memiliki akses untuk hak bekerja, hingga mereka kesulitan bertahan hidup di tengah [penolakan](#) warga setempat.

Hingga saat ini, Indonesia memang belum menandatangani Konvensi Terkait Status Pengungsi, atau dikenal sebagai [Konvensi Pengungsi 1951](#) dan [Protokolnya pada 1967](#). Namun demikian, berdasarkan Peraturan Presiden ([Perpres](#)) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Indonesia memberikan akses dan perlindungan sementara bagi pengungsi di dalam negeri hingga ditemukan

solusi jangka panjang bagi mereka. Berdasarkan aturan tersebut pula, Pemerintah memberi wewenang kepada UNHCR, IOM, dan sejumlah lembaga negara untuk membantu melindungi dan menemukan solusi bagi para pengungsi.

Migran sendiri juga berjuang di tengah pandemi. IOM [mencatat](#) bahwa ada sekitar 40.000 pekerja migran yang pulang ke Indonesia pada Juni-Juli 2021 saja, dan mereka tidak bisa kembali bekerja karena pandemi. Survei IOM pada 2.100 responden menunjukkan bahwa sekitar 72 persen pekerja migran yang kembali harus menganggur setelah kepulangan mereka. Namun, pekerja migran Indonesia yang pulang dari luar negeri masuk ke dalam program vaksinasi nasional, berbeda dengan pekerja asing yang tidak secara langsung disebut di rencana program vaksinasi nasional.

Sementara itu, inisiasi vaksinasi bagi pengungsi dan migran asing juga masih dilakukan dengan kerja sama antara UNHCR, IOM, pihak swasta, dan pemerintah daerah, dipayungi peraturan Kementerian Kesehatan. Di tengah kondisi ini, baik UNHCR maupun IOM telah berupaya mengadakan vaksinasi bagi kelompok pengungsi dan migran. Pada 8-10 September 2021 lalu misalnya, UNHCR bekerjasama dengan IOM, UNICEF, dan Kantor Kepala Perwakilan PBB di Indonesia (RC's Office) [menyelenggarakan](#) vaksinasi COVID-19 untuk pengungsi berusia 60 tahun ke atas, dan beberapa pengungsi dengan penyakit penyerta yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan vaksinasi ini diikuti hampir 300 pengungsi.

Pengungsi dan migran tidak boleh ditinggalkan dalam proses vaksinasi COVID-19. Mereka memiliki hak asasi manusia atas kesehatan, dan negara berkewajiban untuk menyediakan layanan perawatan kesehatan.

Tim PBB di Indonesia sedang meningkatkan upayanya dalam memerangi misinformasi, mempromosikan solidaritas, dan mendorong kesetaraan vaksin melalui *Verified* - sebuah inisiatif daring untuk menyampaikan informasi terpercaya, nasihat yang menyelamatkan jiwa, dan kisah-kisah terbaik dari umat manusia. Untuk lebih meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memerangi misinformasi, tim PBB di Indonesia bermitra dengan Tirto.id - media online Indonesia dengan 800.000+ pengguna aktif harian yang menyediakan berita yang didukung oleh fakta dan analisis data. Tirto.id adalah bagian dari mitra Facebook Indonesia, Pemeriksa Fakta Pihak Ketiga, penandatanganan Jaringan Pengecekan Fakta Internasional, dan memenangkan Media Siber Inovatif di Penghargaan PWI 2018. [Baca artikel lengkap ketiga tentang vaksinasi migran dan pengungsi di Indonesia di sini.](#)

